

Kriminalitas, Hegemoni, dan Politik: Premanisme di Yogyakarta Pada Masa Orde Baru

Crimes, Hegemony, and Politics: Premanism in Yogyakarta during The New Order

*Julianto Ibrahim

Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Gadjah Mada

*Corresponding author: juliantoibrahim@ugm.ac.id

ABSTRACT Indonesian democracy, despite being praised as an example of democracy in Muslim majority country, has been marked with the important role of non-state actors in influencing the social, economic, and political conditions of a society that are outside the government structure. One of the actors who play an important role in influencing the condition of society is the presence of thugs and their acts of thuggery. This pattern of politics can be traced back to the era of New Order. This research attempts to reveal and describe the actions carried out by thugs and their impact on the lives of the people of Yogyakarta during the New Order era. The method used is the oral history method by interviewing the actors of non-state politics in Yogyakarta, primarily prominent young paramilitary or thug groups including *Joxzin*, *Qizruh*, Pemuda Pancasila and their relations with major political parties at that time, *Golkar*, *PDIP* and *PPP*. This research reveals that during the New Order era, thugs in Yogyakarta collaborated and cooperated with political forces. Political power utilizes thugs as a force that can suppress political opponents with violence and as a means of gaining votes in elections. Meanwhile, thugs join political forces with the intention of seeking political protection for their criminal acts and as a means of pursuing a career for a better future. *Golkar* in Yogyakarta used the mass organization Pemuda Pancasila (PP) as an element that could be used to suppress and intimidate political opponents. Meanwhile, *PPP* and *PDI* used their party's *laskars* (paramilitary wing) in securing and dealing with the violence they faced. The main strength of the *laskars* in *PPP* and *PDI* actually came from the wild youth organizations, namely *Joxzin* and *Qizruh*. For the two groups, known for their violent repertoires, this presents an alternative to express themselves and a place to find identity. When the New Order rule ended in 1988, *Qizruh*

ABSTRAK Non state aktor merupakan aktor yang berperan penting dalam mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat yang berada di luar struktur pemerintahan. Salah satu aktor yang berperan penting dalam mempengaruhi kondisi masyarakat adalah keberadaan para preman dan aksi-aksi premanismenya. Pada masa Orde Baru, para preman di Yogyakarta berkolaborasi dan bekerja sama dengan kekuatan politik. Kekuatan politik memanfaatkan para preman sebagai kekuatan yang bisa menekan lawan politik dengan kekerasan dan sebagai sarana mendapatkan suara dalam pemilu. Sementara itu, para preman bergabung dengan kekuatan politik dengan maksud mencari perlindungan secara politik atas aksi-aksi kriminalitasnya dan sebagai sarana meniti karir untuk masa depan yang lebih baik. *Golkar* di Yogyakarta memanfaatkan organisasi massa Pemuda Pancasila (PP) sebagai elemen yang bisa dipergunakan untuk menekan dan mengintimidasi lawan-lawan politiknya. Sementara itu, *PPP* dan *PDI* memanfaatkan laskar-laskar partainya dalam mengamankan dan menghadapi kekerasan-kekerasan yang dihadapi. Kekuatan utama laskar-laskar di *PPP* dan *PDI* justru berasal dari organisasi liar anak muda yang eksis setelah terjadi peristiwa Petrus, yaitu *Joxzin* dan *Qizruh*. Pada saat "kekuasaan" dunia hitam kosong, *Joxzin* dan *Qizruh* hadir sebagai alternatif dari anak-anak muda untuk mengekspresikan diri dan wadah dalam mencari identitas. Dengan cepat *Joxzin* dan *Qizruh* mendapatkan banyak anggota dan terkenal dengan reputasinya yang suka berkelahi, pemberani, tukang bacok, sadis, dan brutal. Setelah vakum untuk sementara waktu pada tahun 1988, pentolan-pentolan *Qizruh* bergabung ke *PP* yang berarti mendukung *Golkar*, dan beberapa pentolan lainnya memilih mendukung *PDI*. Sementara itu, Sesepuh-sesepuh *Joxzin* banyak berkarir menjadi kekuatan utama

leaders joined PP which meant supporting *Golkar*, and several other leaders chose to support PDI. Meanwhile, *Joxzin's* elders had many careers as the main force of the *laskars* in PPP.

KEYWORDS *Criminality; Power; The new order; thuggery; violence; Yogyakarta.*

PENGANTAR

Orde Baru merupakan sebuah rezim pimpinan Suharto yang berkuasa di Indonesia selama 32 tahun. Orde Baru menitikberatkan kebijakannya pada stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi sebagai pilihan yang rasional karena Orde Baru dibangun di atas kebangkrutan ekonomi (Iswandi, 1998: 57). Ali Murtopo mengemukakan bahwa Stabilitas politik dan keamanan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan bidang ekonomi. Stabilitas politik dan keamanan nasional merupakan syarat utama bagi kelangsungan pembangunan di bidang ekonomi (Ali Murtopo, 1981: 28).

Sebagai pemenang dalam krisis nasional 1965, militer memiliki posisi yang strategis dan merupakan penggerak utama pemerintahan di bawah rezim Orde Baru (Ibrahim, 2002: 3). “Kemenangan” militer yang membawanya pada jenjang karier di pemerintahan dengan menafsirkan begitu luas konsep dwifungsi ABRI disahkan negara-negara barat dalam kerangka membendung pengaruh ideologi komunis di negara-negara dunia ketiga. Kenyataan ini seperti apa yang dikemukakan oleh Salim Said bahwa dalam momentum perang dingin pascaperang dunia II dan kegagalan penerapan demokrasi parlementer di negara-negara dunia ketiga,

dari laskar-laskar yang ada di PPP. Penelitian ini berupaya mengungkapkan dan mendiskripsikan aksi-aksi yang dilakukan para preman beserta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Yogyakarta pada masa Orde Baru. Metode yang digunakan adalah metode sejarah lisan dengan cara wawancara terhadap pelaku maupun saksi yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

KATA KUNCI *Kriminalitas; Kekuasaan; Orde Baru; Pembunuhan; Kekerasan; Yogyakarta.*

termasuk Indonesia, telah memperlancar jalan bagi negara barat yang kapitalistik untuk menciptakan rezim militer daripada negara jatuh dalam rezim komunis (Iswandi, 1998: 58). Pemerintahan Orde Baru berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi ini tidak akan berhasil tanpa mekanisme kontrol dari militer. Keadaan ini pernah dianalisa oleh Albert Szymanski yang mengemukakan bahwa mekanisme pemeliharaan atau pun pembentukan sebuah pemerintahan yang kapitalistik adalah dengan mekanisme kontrol militeristik (Szymansky, 1978: 264-265).

Kontrol militeristik pemerintah Orde Baru bersifat sentralistik dan hegemonik. Mohamad Sobary mengemukakan bahwa dalam “negara agung” Orde Baru bahwa hegemoni dirancang dan dilaksanakan sampai tingkat desa, seperti jaksa masuk desa, ABRI masuk desa, koran masuk desa, dan lain-lain yang menunjukkan begitu kuatnya cengkeraman pusat atas desa (Sobary, 1996: 49). Louis Althusser mengemukakan bahwa manifestasi ideologi hegemonik berlangsung melalui pengaruh budaya yang disebarkan secara sadar dan dapat meresap, dan berperan dalam menafsirkan pengalaman tentang kenyataan. Proses penafsiran itu memang berlangsung secara sembunyi (tersamar), tetapi terjadi secara terus

menerus (Subandi Ibrahim dan Djamaludin Malik, 1997: xv). Clifford Geertz berdasarkan pengalamannya di Indonesia dan Maroko menambahkan bahwa manusia selalu terjebak dalam upayanya mempertahankan pribadi (*personal*) yang tereduksi dan terspesialisasi di tengah-tengah arus hegemoni politik yang selalu membuntuti walaupun dalam “pertapaan” yang suci (Geertz, 1999: 144-145).

Hegemoni itu dimungkinkan lewat proses regimentasi yang meluas sampai ke alam bawah sadar manusia. Hegemoni inilah yang dalam jangka panjang dapat mengisi pikiran-pikiran, nilai-nilai, kecenderungan-kecenderungan, dan impian-impian manusia (Mochtar Pobotinggi, 1986: 215).

Pemerintahan Orde Baru yang hegemonik menghasilkan dua hal, yaitu rakyat yang tidak berdaya atas dominasi Orde Baru dan rakyat yang tidak boleh menyimpang dari kebijakan Orde Baru. Dominasi negara yang begitu kuat membuat rakyat tidak mempunyai pilihan, selain harus patuh dan taat kepada negara. Dominasi yang berlangsung lama dan memaksa membuat kepatuhan rakyat yang “semu” dan ketaatan yang terpaksa. Rakyat dihadapkan pada kenyataan bahwa pembangunan hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ternyata justru menimbulkan kesenjangan yang semakin lebar di antara struktur masyarakat. Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada *dislokasi* sosial individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat. *Dislokasi* yang dapat dimaknai dengan tersingkirnya kepentingan sebuah kelompok dapat memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat (Neyla Vellayati, 2017). Dalam hal

ini, premanisme yang muncul didasari pada faktor-faktor ekonomi dan sosial.

Di sisi lain, untuk menjaga hegemoni dan mencegah munculnya aksi-aksi yang menentang pemerintah, rezim Orde Baru memanfaatkan organisasi-organisasi massa dan mengizinkannya melakukan aksi-aksi premanisme (Solidaritas.Net, 2015). Kebijakan ini dimaksudkan agar pemerintah dapat melakukan kekerasan dan menekan kelompok-kelompok yang berposisi tanpa dapat dipersalahkan. Sementara itu, kelompok-kelompok preman mengambil keuntungan berupa kemudahan-kemudahan dalam akses ke sumber-sumber ekonomi. Dengan demikian, hubungan negara dengan kelompok-kelompok preman merupakan hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme.

Hubungan negara dengan preman tersebut kemudian diadopsi oleh partai-partai politik untuk menarik massa dukungan dan mengintimidasi lawan-lawan politiknya. Kelompok-kelompok preman tersebut ibarat “pasukan keamanan” yang akan membela dan menghadapi benturan-benturan maupun ancaman-ancaman dari partai politik lainnya. Dengan kata lain, partai-partai politik maupun kelompok-kelompok massa lainnya memanfaatkan aksi-aksi premanisme untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Dian Adelina, 2017).

Pada masa Orde Baru, premanisme yang menarik dikaji di tingkat lokal adalah premanisme di Yogyakarta. Tidak hanya sebagai kota pelajar maupun pusat kebudayaan Jawa, Yogyakarta berkembang menjadi kota heterogen yang didatangi hampir dari seluruh Indonesia untuk belajar dan menuntut ilmu di kota ini. Terlebih lagi,

Yogyakarta merupakan kota yang memicu munculnya OPK (Operasi pemberantasan Kejahatan) yang terkenal dengan nama petrus (penembakan misterius) yang terjadi antara tahun 1983 sampai 1984. OPK merupakan operasi pembersihan terhadap gali-gali atau preman yang dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat karena aksi-aksi kriminalitasnya (Wawancara dengan Suprpto, 7 Oktober 2017). Pada saat OPK sudah mereda dan “dunia” preman tidak ada lagi aktor yang berpengaruh dan disegani, muncul organisasi-organisasi liar anak-anak muda yang tergabung dalam gank Joxzin (Wawancara dengan Rahmadi, 25 September 2017) dan Qizruh (Wawancara dengan Darto, 18 September 2017). Dua gank legendaris Jogja inilah yang kemudian mengisi kekosongan di “dunia” hitam dan mempunyai pengaruh hingga ke partai politik dan keamanan di Yogyakarta. Selain dua gank ini, kekuatan preman yang berperan di Yogyakarta pada masa Orde Baru adalah Pemuda Pancasila, laskar-laskar PPP dan PDI, serta fenomena *Gun Jack*. Pemuda Pancasila (PP) berafiliasi pada Golkar, Joxzin merupakan kekuatan utama dari massa pendukung laskar-laskar PPP, sedangkan Qizruh terpecah antara yang memilih menjadi anggota PP yang berarti mendukung Golkar dengan anggota yang memilih sebagai kekuatan di laskar-laskar PDI.

Untuk lebih memahami dan mengerti aktivitas para preman dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: (1) Mengapa partai-partai politik maupun institusi-institusi lokal di Yogyakarta memanfaatkan kelompok-kelompok preman untuk kepentingnya? (2)

Bagaimana hubungan antara partai-partai politik di Yogyakarta dengan kelompok-kelompok preman? (3) Bagaimanakah aktivitas kelompok-kelompok preman di yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Yogyakarta? (4) Bagaimanakah bentuk-bentuk premanisme yang muncul dan berkembang di Yogyakarta?

Tulisan yang dapat memberi gambaran secara teoritis mengenai kriminalitas atau perbanditan termasuk di dalamnya adalah premanisme adalah karya-karya Hobsbawn, seperti: *Primitive Rebels*, *Bandits*, maupun *Social Banditry*. Hobsbawm (1972: 1-10) mengemukakan bahwa fenomena perbanditan merupakan bagian dari protes sosial terhadap pemerintah dan perkebunan yang merugikan petani. Sebagai bagian dari protes sosial, perbanditan tidak dapat dilepaskan dengan: (1) perasaan tidak puas; (2) sukar melepaskan perbanditan yang sesungguhnya dengan gerakan sosial, dan (3) gambaran situasi yang masih primitif. Tokoh-tokoh bandit seringkali dianggap pahlawan atau “jagoan” karena menempatkan musuh para petani sama dengan musuh para bandit.

Perbanditan sebagai bagian dari protes sosial sering terjadi di Jawa. Suhartono (1993) mengemukakan bahwa munculnya fenomena bandit sebagai reaksi terhadap dominasi perkebunan atas kehidupan petani di pedesaan. Dunia perbanditan merupakan kehidupan dunia “bawah” atau dunia “hitam” yang selalu menampakkan diri pada saat-saat tertentu. Dunia bawah adalah dunia yang penuh misteri dan diliputi oleh kerahasiaan, yang semuanya serba tertutup dari luar lingkungannya. Hanya orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dan menembus dunia seperti ini. Sejak masa kerajaan Jawa Kuno,

telah ditempatkan seorang birokrat rendahan yang bertugas mengetahui perkembangan dunia bawah atau *alam peteng*. Petugas inilah yang disebut dengan *kapetengan*. Jabatan *kapetengan* ini mirip dengan dinas rahasia kerajaan dan juga semacam pemandu dunia hitam yang mampu mengetahui seluk beluk dunia bawah dengan segala anatominya.

Pada masa Orde Baru identifikasi penjahat dan kejahatan sangat ditentukan oleh regim penguasa. Menurut James T. Siegel (2000), setidaknya ada empat hal yang terjadi pada masa Orde Baru yang dikaitkan dengan kejahatan, yaitu (1) Bagi Orde Baru suara rakyat adalah suara penguasa itu sendiri yang telah baku dan harus diikuti; (2) Negara sangat menentukan sosok kriminal, bila tidak dekat dengan penguasa maka akan dicap sebagai pengikut komunisme dan dianggap sebagai ancaman bagi negara; (3) Dua hal yang ditakuti rezim Orde Baru, yaitu Mahasiswa yang vokal dan komunisme. Bahkan penguasa Orde Baru sampai harus menciptakan “hantu-hantu” komunisme sebagai penjahat-penjahat yang mengancam negara; (4) Orde Baru menciptakan segala desas desus yang disebarluaskan dengan pengawasan dan valuasi penuh yang kembali kepada negara lagi. Hal ini untuk memperkuat legitimasi negara dan mengesampingkan rakyatnya sendiri.

PEMBAHASAN

Premanisme di Yogyakarta

Makna dan warisan Masa Lalu

Preman berasal dari bahasa Belanda yaitu *Vrijman* yang mempunyai arti orang yang bebas dari kerja paksa (Lren Ryter, 1998: 45). Istilah preman dapat ditelusuri hingga abad ke-17 ketika VOC berkuasa di Hindia Timur.

Sebutan preman dipakai terhadap mereka yang tidak bekerja pada VOC, tetapi mereka diizinkan tinggal di wilayah Hindia Belanda dan melakukan transaksi perdagangan untuk keuntungan VOC. Kemudian, kata “preman” menjadi istilah yang digunakan untuk menunjuk mereka para pelaku kejahatan atau mereka yang berkecimpung dalam “dunia hitam”, yaitu dunia kehidupan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, kehidupan tentang orang-orang yang melakukan kejahatan, kekerasan, dan kriminalitas (Jogi Simanjuntak, 2000).

Istilah untuk menyebut orang-orang yang melakukan kejahatan sudah lama ada dan seiring dengan perkembangan manusia Indonesia itu sendiri. Pada masa kerajaan, muncul istilah *begal* untuk menyebut orang yang melakukan perampokan atau menghadang perjalanan orang lain dengan maksud mengambil harta benda yang dibawanya. Pada masa kolonial, dikenal istilah *kecu* untuk menyebut orang yang melakukan kejahatan, perampokan dengan kekerasan, dan pencurian (Suhartono, 1993). Pada akhir masa kolonial hingga awal revolusi kemerdekaan muncul istilah *gedor* yang merupakan orang atau sekelompok orang yang melakukan perampokan dan pencurian dengan memaksa masuk rumah orang yang tidak jarang melukai atau membunuh korbannya. Sasaran penggedoran adalah harta benda milik korbannya dan hewan ternak terutama sapi dan kambing (Ibrahim, 2004). Pada masa revolusi dikenal istilah *jagoan*, *jawara*, *lenggaong*, maupun *grayak* yang merupakan orang atau sekelompok orang yang melakukan kejahatan dengan cara kekerasan, perampokan, penculikan, pencurian, dan pembunuhan. Pada tahun

1970an hingga awal tahun 1980an dikenal istilah *gali* yang merupakan singkatan dari *Gabungan anak liar* yang populer setelah muncul film “Ali Topan Anak jalanan” yang menggambarkan identitas anak muda yang penuh gairah dalam mencari identitas. *Gali* diidentikkan dengan perbuatan yang melawan hukum, berani dengan orang tua, suka memalak di pasar, melakukan pencurian, perampokan, dan kadang-kadang melukai bahkan membunuh korbannya. Setelah peristiwa *Petrus* (penembakan misterius) pada tahun 1983 dan 1984, istilah *gali* mulai memudar dan lambat laun digantikan dengan preman. Henk Schulte Nordholt (2002: 22) menegaskan bahwa istilah preman masa Orde Baru lebih memiliki makna sebagai Prajurit berpakaian sipil, agen dalam samaran, dan perantara kekerasan politik. Dalam istilah genealogi, preman adalah cucunya jagoan, yang membangun “bisnis”nya dengan kekerasan, sebagai “penjaga” keamanan, serta berkolaborasi dan bersekutu dengan pemegang kebijakan dan sumber-sumber ekonomi. Para preman berkoalisi dan menjalin hubungan dengan kekuatan politik, pemegang sumber-sumber ekonomi, dan pemerintah dengan hubungan yang saling menguntungkan. Dengan watak patrimonisme Orde Baru, tidak dapat dibedakan dan dipisahkan antara kepentingan umum negara dengan kepentingan pribadi pemegang kekuasaan dan organisasi massa pendukungnya (para preman) dengan ciri khas kekerasan yang dapat dibeli dengan harga yang murah. Lren Lyter (1993: 45-73) menegaskan bahwa organisasi-organisasi kepemudaan dimanfaatkan oleh elite-elite politik untuk melakukan kegiatan sejenis premanisme dengan menggunakan ancaman

dan kekerasan sebagai metode utamanya untuk mendapatkan keuntungan politik. Militer pun berupaya kuat agar kelompok pemuda berpartisipasi demi membasmi musuh-musuh pemerintah dan kemudian kelompok kepemudaan itu dijadikan mitra guna bersama-sama menjaga keberadaan Orde Baru.

Hobsbawm(1972:1-10)menjelaskan bahwa bandit yang melakukan kriminalitas dengan latar belakang idiologi atau mempunyai alasan-alasan baik sosial, ekonomi, maupun politik dapat dikategorikan sebagai bandit sosial. Sementara itu, bandit yang melakukan kejahatan hanya semata-mata urusan perut atau mendapatkan sejumlah uang merupakan bandit ordinary atau bandit biasa. Jagoan, jawara, benggol, bahkan preman bisa dikategorikan dalam bandit sosial. Terlebih lagi definisi preman sebagaimana yang dikemukakan oleh Henk Schult Nordholt sebagai prajurit berpakaian sipil atau agen kekerasan merupakan kategori dari bandit sosial. Menurut Hobsbawm (1959), bandit sosial memunculkan perilaku premanisme yang melanggar hukum-hukum pemerintah, sehingga menghasilkan jaringan premanisme, sindikat kejahatan, maupun pembajakan internasional. Penjelasan Hobsbawm ini sangat sesuai untuk menjelaskan perilaku premanisme di Indonesia masa Orde Baru.

Gank, Organisasi Massa, dan Partai Politik di Yogyakarta

Sebagaimana yang terjadi pada masa revolusi, para preman pada masa Orde Baru berkoalisi dan bersekutu dengan kekuatan politik atau pemegang kekuasaan. Hubungan di antara mereka bersifat simbiosis mutualisme, di mana kekuatan

politik atau partai politik membutuhkan para preman karena keberanian, dapat menyelesaikan masalah-masalah kekerasan, dan jago berkelahi, sementara itu para preman membutuhkan partai politik untuk mendapat keuntungan ekonomi dan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, partai-partai politik seperti PPP, Golkar, dan PDI mempunyai pendukung yang terdiri dari para preman yang bersedia membela partai dengan cara apapun termasuk kekerasan. Para preman tersebut membentuk organisasi-organisasi massa atau kelompok-kelompok liar (*genk*) sebagai samaran atau kamufase atas perilaku yang dilakukan serta sebagai sarana konsolidasi dan pembentuk identitas. Selain itu, ormas maupun *genk* dapat dengan mudah menarik pengikut maupun simpatisan. Beberapa organisasi massa yang melakukan premanisme di Yogyakarta pada masa Orde Baru dan berafiliasi dengan partai-partai politik adalah Pemuda Pancasila (PP), Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), Qizruh, dan Joxin.

Golkar, Satgas, dan Pemuda Pancasila

Golkar merupakan partai penguasa yang menggunakan berbagai macam cara agar keberadaannya tidak tergantikan. Menurut Sukri Fadholi bahwa rezim Orde Baru dengan Golkarnya mempunyai kepentingan menekan partai-partai lain agar tidak dapat bersaing atau mengungguli Golkar dalam perolehan suara pemilu. Golkar merekrut dan melembagakan para preman agar mampu menghadapi kekuatan-kekuatan pemuda dari partai-partai lain (Wawancara dengan Syukrfi Fadholi, 21 September 2017). Persaingan di antara kekuatan anak-anak muda dari Golkar, PPP, dan PDI dapat

menimbulkan bentrokan, perkelahian, bahkan saling membunuh (Wawancara dengan Harun Al Rasyid, 18 September 2017). Sementara itu, para preman atau organisasi-organisasi massa bersedia bergabung atau berafiliasi dengan kekuatan politik dengan alasan sebagai tempat perlindungan dan menjanjikan karir yang lebih baik untuk masa depan (Wawancara dengan Darto, 18 September 2017). Organisasi massa yang dipergunakan oleh Golkar untuk melanggengkan kekuasaan dan banyak melakukan tindakan-tindakan premanisme dan kekerasan adalah Pemuda Pancasila (PP).

Pemuda Pancasila didirikan oleh Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) pada tanggal 28 Oktober 1959 di Jakarta oleh Ahmad Yani, A.H. Nasution, dan Gatot Subroto. Fase pendiriannya di pengujung tahun 50-an ditandai dengan perjuangan politik untuk menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diamanatkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada fase inilah karakter organisasi dan orientasi ideologi Pemuda Pancasila terbentuk. Manifestasi dari karakter organisasi dan orientasi ideologis dimaksud tercermin dari sikap dan komitmennya yang teguh untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan perekat ke Bhinnekaan bangsa (pemudapancasila04.blogspot.co.id, 2009).

Fase perjuangan Pemuda Pancasila di era 60-an ditandai dengan pergulatan melawan kekuatan PKI dan antek-anteknya yang berupaya mengubah ideologi negara dengan paham komunis dan aktif melakukan politik *divide et impera* di kalangan elit dan masyarakat akar rumput. Salah seorang pendiri HMI bahkan pernah memberikan kesaksian bahwa pada masa itu (1959-1966)

Pemuda Pancasila dikenal sebagai salah satu organisasi yang gigih memerangi PKI dan antek-anteknya. Fase ini dapat dikatakan sebagai era peneguhan karakter Pemuda Pancasila sebagai pengawal ideologi Pancasila (pemudapancasila04.blogspot.co.id, 2009). Pada tahun 1973, IPKI bergabung dengan PDI, sedangkan Pemuda Pancasila lebih memilih berafiliasi dengan Golkar (Abdul Arif, 2003: 23). Sebagai salah satu kekuatan pendukung Golkar, PP kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Yogyakarta.

Tidak diketahui secara pasti, sejak kapan Pemuda Pancasila didirikan di Yogyakarta. Sebagai organisasi kemasyarakatan, PP memiliki banyak anggota dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Agar mendapatkan anggota yang banyak, perekrutan dilakukan secara bebas atau tidak membuat persyaratan yang sulit dan menerima anggota dari berbagai macam kalangan (Wawancara dengan Farid Jayen). Syaratnya hanya foto copy KTP, membuat surat pernyataan, bahkan bebas bergabung tanpa melengkapi persyaratan apapun (Wawancara dengan Suharto, 25 September 2017 dan Eko Erdianto, 14 September 2017).

PP memiliki anggota dengan latar belakang yang beragam, seperti pegawai bank, pegawai leasing, dosen, pengacara, pedagang, mahasiswa maupun pelajar (Wawancara dengan Darto, 18 September 2017). PP juga merekrut dan menerima anggota dari para pengangguran, anggota-anggota *genk*, preman-preman pasar maupun preman-preman terminal. Pemuda Pancasila menempatkan anggotanya yang khusus bertugas merekrut preman-preman di beberapa tempat seperti terminal, pasar,

maupun tempat-tempat hiburan dengan bekerja sama dengan SPSI Yogyakarta agar mendapatkan anggota yang banyak (Wawancara dengan Heri Wibisono, 16 September 2017). Perekrutan ini merupakan bagian dari upaya PP membina masyarakat terutama masyarakat yang terjebak dalam perbuatan kriminal (Wawancara dengan Suharto, 25 September 2017). Terkadang, para anggota *genk* yang dengan suka rela bergabung ke dalam PP agar memiliki masa depan yang lebih baik. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Darto Qzruh, setelah pembubaran seluruh *gank* yang ada di Yogyakarta yaitu Qzruh, Joxzin, SEC, TRB, dan Warkop di Mapolresta Yogyakarta tahun 1988, Darto membawa sebagian besar anggota Qzruh masuk ke PP (Wawancara dengan Darto, 18 September 2017). Walaupun PP memilih aspirasinya ke Golkar, tetapi ada juga anggota PP yang memilih PDI atau PPP sebagai aspirasi politiknya (Wawancara dengan Heri Wibisono, 16 September 2017).

Ketertarikan orang masuk PP karena organisasi ini dianggap dapat dijadikan sarana untuk *survival* dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik di masa depan. PP bisa diibaratkan Badan-badan perjuangan semasa revolusi kemerdekaan yang oleh Sartono Kartodirdjo sebagai pusat identitas kelompok serta wahana untuk menjamin kelangsungan hidupnya (*survival*). Bila ada krisis atau benturan dengan kelompok lain, justru dapat memperkuat identitas seseorang dalam suatu kelompok (*sense of belonging*). Aktivitas perseorangan dan kelompok dirasakan menjadi *urgent*, maka solidaritas sosial meluas karena mobilisasi politik mudah digalakkan (Sartono Kartodirdjo, 1981: 5). Setiap anggota PP mendapat pelatihan dan

pembinaan baik fisik maupun mental agar mudah digerakkan dan memiliki tujuan yang sama.

Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan PP dimaksudkan agar setiap anggota dapat bersikap disiplin, cinta tanah air, memiliki jiwa korsa, tidak loyo, dan pemberani. Pelatihan dilakukan secara militer dengan penggemblengan fisik dan mental. Secara fisik, pelatihan dilakukan dengan baris berbaris, lari, ketahanan fisik, dan lain-lain. Secara mental, anggota diberi doktrin-doktrin yang dapat menumbuhkan keberanian dan keteguhan. Untuk menumbuhkan keberanian, PP juga melatih bela diri anggotanya. Setiap anggota boleh mengikuti pelatihan bela diri di markas PP, boleh tidak mengikuti, bahkan diperbolehkan mengikuti bela diri di tempat lain. Setelah menerima pelatihan, anggota PP juga mendapatkan pengetahuan tentang organisasi dan kepemimpinan. Memberikan wawasan tentang peta politik, pergaulan yang positif, dan visi misi organisasi (Wawancara dengan Suharto, 25 September 2017). Anggota yang sudah lama mengabdikan dan serius pada organisasi bisa mengikuti pelatihan kader dengan melalui seminar-seminar. Pelatihan kader dilakukan di tingkat nasional dengan penggemblengan pada ideologi Pancasila, bela negara, anggaran rumah tangga, dan wawasan kebangsaan. Pelatihan kader ini merupakan syarat mutlak bagi anggota PP yang ingin menjadi pengurus PP. Oleh karena itu, dalam organisasi PP terdapat anggota yang berbasis kader dan anggota biasa (Wawancara dengan Heru Wintaka, 29 Agustus 2017).

Untuk mewadahi berbagai macam anggota yang memiliki latar belakang yang berbeda, PP Yogyakarta membentuk

organisasi SAPMA (Satuan Pemuda dan Mahasiswa, Lembaga Srikandi), BPPH (Badan Pendamping dan Penyuluh Hukum), lembaga pengusaha, dan lain-lain. Organisasi-organisasi bentukan PP tersebut diharapkan membantu PP dalam perekrutan maupun penyelesaian masalah sesuai bidangnya. SAPMA berperan dan membantu PP dalam menarik simpati mahasiswa dan pelajar agar bersedia bergabung ke dalam PP. BPPH membantu PP dalam penyelesaian masalah hukum terutama membantu anggota-anggota PP yang terlibat kriminalitas, perkelahian, atau masalah hukum lainnya (Wawancara dengan Farid Jayen, 29 September 2017).

Sebagai sebuah organisasi massa yang memiliki banyak anggota dengan berbagai macam latar belakang, PP merupakan organisasi yang disegani dan ditakuti. PP merupakan organisasi kemasyarakatan yang paling kuat selama masa Orde Baru karena mendapat dukungan dari partai penguasa yaitu Golkar. Golkar membutuhkan PP karena sebagai sarana mendapatkan suara dalam pemilu dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Golkar walaupun dengan cara-cara kekerasan. Sementara itu, PP mendapat banyak fasilitas dan kemudahan, serta pengurus-pengurus PP dapat berkarir di jalur politik. Ketua wilayah PP dapat dipastikan mendapat jatah anggota DPRD Provinsi bahkan bila beruntung dipromosikan menjadi anggota DPR pusat. Ketua cabang PP di Kabupaten mendapat jatah anggota DPRD Kabupaten dan bila masih ada kursi maka dapat dipromosikan menjadi anggota DPRD Provinsi (Wawancara dengan Suharto, 25 September 2017, Farid Jayen, 29 September 2017, dan Heru Wintaka, 29 Agustus 2017).

Sebagai organisasi simpatisan dari sebuah organisasi politik peserta pemilu, seringkali PP berbenturan atau bergesekan dengan organisasi lain yang merupakan simpatisan dari partai politik lawan. Gesekan dalam kampanye biasanya disebabkan konvoi yang dilakukan melewati basis massa pendukung lawan. Pada saat kampanye, koordinasi dilakukan antara satgas-satgas Golkar dengan PP. Tanggung jawab keamanan terletak pada satgas Golkar, sedangkan PP hanya membantu bila terjadi masalah seperti gesekan atau bentrokan (Wawancara dengan Harun Al Rasyid, 18 September 2017). Bentrokan yang terjadi dapat berupa pukul-pukulan bahkan bacok-bacokan. Tidak jarang peserta kampanye itu mabuk, sehingga tindakannya terlihat brutal dan sadis (Wawancara dengan Eko Ardianto, 14 September 2017).

Pemuda Pancasila sebagai organisasi massa pendukung Golkar terkenal dengan reputasinya yang pemberani, suka berkelahi, dan tidak mengenal rasa takut. Oleh karena itu, banyak anggota PP yang disewa atau dipekerjakan sebagai tenaga keamanan di perkantoran, gudang, maupun hiburan malam. Dalam menjalankan tugasnya, seringkali anggota PP bergesekan dengan tenaga keamanan lainnya, sehingga menimbulkan bentrokan dan perkelahian (Wawancara dengan Darto, 18 September 2017). Dalam hal ini PP diuntungkan dengan posisinya sebagai organisasi massa milik pemerintah, sehingga didukung kekuatan-kekuatan lain seperti ABRI maupun polisi. Oleh karena itu tidak aneh apabila PP dianggap sebagai organisasi preman yang menyelesaikan masalahnya dengan cara kekerasan (Nordholt, 2002: 22).

PPP, Satgas, dan Laskar

Tidak hanya Golkar yang merekrut dan menerima keanggotaan dari para preman, tetapi juga Partai Persatuan Pembangunan. Kehadiran preman dalam partai politik itu adalah keniscayaan, karena diperlukan dalam menghadapi gesekan-gesekan dengan partai lain yang juga melakukan aksi-aksi kekerasan (Wawancara dengan Syukri Fadholi, 21 September 2017). Anak-anak muda “pemberani” ini penting bagi partai karena dapat menghilangkan gangguan-gangguan pada saat kampanye. Apabila partai terlihat lemah atas aksi-aksi lawan politik, maka hal itu dapat melemahkan moral para simpatisan yang pada akhirnya susah mendapatkan simpati dari pemilih-pemilih pemula yang merupakan anak muda. Dengan demikian, kehadiran preman dengan penuh keberaniannya itu dapat meningkatkan moral simpatisan lainnya dan menjadi sarana mendulang suara dalam pemilu (Wawancara dengan Muhammad Alfian Darmawan, 26 September 2017).

Dalam organisasi PPP, terdapat satgas dan puluhan laskar yang membantu PPP dalam mengatasi masalah-masalah kekerasan bila bergesekan dengan partai lainnya. satgas atau satuan tugas menangani masalah keamanan partai yang diibaratkan sebagai “polisi”nya partai (Wawancara dengan Syarif Hidayat, 13 September 2017). Satgas menjaga keamanan kegiatan partai dari mulai pengajian, bakti sosial, musyawarah partai, hingga menjaga keamanan simpatisan-simpatisan PPP pada waktu kampanye (Wawancara dengan Suseno, 20 September 2017). Oleh karena itu, syarat menjadi anggota satgas partai adalah pemberani. Anggota satgas biasanya diambilkan dari laskar-laskar pendukung

partai yang dianggap *menthol* yaitu yang paling berani dan terkenal di kalangan laskarnya (Wawancara dengan Sapuani, 13 September 2017).

Terdapat puluhan laskar pendukung PPP yang tersebar di hampir setiap daerah di Yogyakarta. Dari sekian banyak, laskar yang menonjol adalah GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah), Hamka (Himpunan Angkatan Muda Ka'bah), AMK (Angkatan Muda Ka'bah), dan laskar elite Hizbullah. Hanya saja GPK baru muncul pada masa reformasi yaitu tahun 2000 yang terkenal sebagai kelompok anak muda brutal, bengis radikal, dan raja konvoi jalanan. GPK hadir dengan atribut yang sangar, sepeda motor blombongan, dan selalu rombongan bila melakukan kegiatan (Wawancara dengan Mas Yosi, 27 September 2017). Akibat dari pandangan demikian, maka GPK sering disebut dengan Gerakan Pengacau Keamanan (<http://ethnohistori.org/edisional/jago-preman-dan-negara>).

Pada masa Orde Baru, sebagian besar laskar yang mendukung PPP melakukan kegiatannya dengan sangat militan. Sebelum GPK muncul, sangat susah menentukan laskar mana yang paling militan karena laskar-laskar yang ada di PPP banyak sekali dan sampai di tingkat desa, seperti Hamka Darwis, AMK, Laskar Hizbullah, Laskar Arapat, Intifada, suara jihad, dll. Keanggotaan laskar sangat terbuka dan longgar hanya dengan syarat loyalitas, sehingga orang sangat mudah keluar dan masuk menjadi anggota (Wawancara dengan Bambang Arif, 20 September 2017). Oleh karena itu, laskar yang militan seringkali berubah-ubah. Militansi justru ditunjukkan oleh anggota-anggota yang berada di beberapa laskar di PP yang berasal dari *Gank Joxzin* yang terkenal

sebagai perkumpulan anak muda yang suka berkelahi, konvoi motor, brutal, dan beringas.

Gesekan antara partai politik yang sering disebut dengan “tempur” terjadi bila kampanye salah satu partai politik melewati wilayah yang basis massanya dikuasai partai lawan. PPP memiliki basis massa yangggbanyak di Kauman, Kota Gede, dan KarangKajen. Golkar mempunyai banyak pendukung Gondokusuman dan Wonokromo. Sementara itu PDI mempunyai basis massa di Ngampilan dan Ngabean (Wawancara dengan Abu Santoso, 20 September 2017). Bentrokan terjadi tidak hanya dengan tangan kosong, tetapi dengan menggunakan senjata tajam seperti samurai, clurit, maupun pedang. Oleh karena itu, korban bentrokan biasanya dengan luka parah dengan banyak bekas bacokan (Wawancara dengan Sapuani, 13 September 2017).

Setelah terjadi bentrokan, kadang-kadang permasalahan belum selesai dan terjadi penyerbuan di markas lawan politik atau mengejar orang yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya bentrokan. Pada tahun 1982, Markas besar PPP di Jalan Tentara Rakyat Mataram Yogyakarta pernah diserbu simpatisan Golkar yang tidak terima atas bentrokan yang sebelumnya terjadi (Wawancara dengan Syukri Fadholi, 21 September 2017). Massa Golkar yang diduga sebagian besar dari PP berhasil masuk ke markas PPP, memukuli orang yang ada di dalam gedung, mengejar yang lari, dan membunuh salah satu simpatisan PPP yaitu Agung Syahida. Abu Santoso yang berhasil lari dikejar massa Golkar yang beberapa di antaranya membawa senjata dan sesekali menembakkannya ke arah Abu Santoso. Abu Santoso berhasil sembunyi di

lahan tebu di daerah Wonokromo hingga malam hari. Fauzi dengan Sukri Fadholi kemudian menyelamatkan Abu Santoso dengan memasukkan ke mobil dan untuk beberapa saat diminta tidur di rumah Mbah Erwahruddin di Jl Cik Di Tiro Yogyakarta (Wawancara dengan Abu Santoso, 20 September 2017).

Joxzin

Keberadaan *Joxzin* tidak dapat dilepaskan dengan adanya *gank Cethol* yang terdiri dari anak-anak SD dan SMP dari kampung Kauman yang menyukai balapan dengan menggunakan sepeda onthel atau BMX. Nama *cethol* diambilkan dari ikan-ikan kecil yang banyak terdapat di kolam atau got-got yang banyak terdapat di Kauman (Wawancara dengan Rizky Kurniawan, 19 September 2017). Seiring dengan waktu, kegemaran menggunakan sepeda berubah menjadi hobi menggunakan sepeda motor, sehingga *gank cethol* menjadi bubar. Beberapa anak mantan *Gank Cethol* yang terbiasa nongkrong di pojok alun-alun kraton, kemudian membentuk *Joxzin* pada tahun 1984. Pada pojok alun-alun tersebut terdapat penjual bensin eceran di samping pohon beringin, sehingga *Joxzin* sering disebut dengan “*Pojok Bensin*” (Wawancara dengan Ervian Parmunadi, 23 September 2017). Agar nyaman untuk duduk mengobrol, anak-anak muda dari kampung Kauman tersebut membuat *lincak* yang diletakkan di bawah pohon beringin (Wawancara dengan Asmuniryas, 30 September 2017). Anak-anak muda yang membentuk *Joxzin* terdiri dari tujuh orang, yaitu Ivan Hoo, Rahmadi, Iwan Empek-empek, Hery N, Yusnianto, Mamad Sukadi, dan Parman (Wawancara dengan Rahmadi, 25 September 2017).

Perekrutan anggota dilakukan melalui informasi antarteman, seperti model Multi level Marketing (MLM) sekarang ini (Wawancara dengan Ervian Pamunadi, 23 September 2017). Pada awalnya, anak muda yang tertarik masuk *Joxzin* berasal dari daerah kauman dan sekitarnya. Semakin lama, anggota semakin banyak yang berasal dari beberapa daerah di Yogyakarta (Wawancara dengan Joko, 30 September 2017). Tempat nongkrong di pojok alun-alun kemudian pindah ke utara di tikungan PDHI dekat Sonobudoyo. Tempat baru ini dapat menampung banyak anggota yang nongkrong dan untuk tempat parkir motor yang dibawanya. Semakin lama, beberapa anggota *Joxzin* membentuk kelompok-kelompok nongkrong di daerah masing-masing. Basis anak-anak *Joxzin* kumpul di Yogyakarta yaitu Kauman, Kota Gede, Karang Kajen, Jogokaryan, daerah bantul, dan lain-lain. Bahkan anggota *Joxzin* meluas hingga ke luar Jogja sampai di Temanggung, Magelang, Semarang, Purworejo, dan beberapa daerah sekitar Jogja lainnya (Wawancara dengan Hidayat Saefullah, 17 September 2017). Kelompok anak-anak *joxzin* baik di beberapa tempat di Yogyakarta maupun luar Yogyakarta disebut dengan fraksi, misalnya fraksi Kotagede, fraksi KarangKajen, fraksi Temanggung, dan lain-lain. Anggota *Joxzin* kebanyakan berasal dari SMA Muhammadiyah 1, SMA Muhammadiyah 2, SMA Muhammadiyah 3, dan SMA 17 (Wawancara dengan Asmuniryas, 30 September 2017). Pada saat anggota semakin banyak, ketertarikan anak muda masuk ke *Joxzin* lebih pada reputasi *Joxzin* yang terlihat “perkasa” di jalanan dan keberaniannya dalam

hal perkelahian (Wawancara dengan Joko “Kadir” Purnomo, 18 September 2017).

Pada saat anggota mulai banyak, tetapi masih nongrong di pojokan alun-alun dekat penjual bensin eceran, beberapa anggota mencoba mengganti nama Joxzin dengan nama yang lebih mewakili anak muda dan menggambarkan aksi-aksi mereka. Atas usul HeryN, nama Joxzin berubah makna dan idiom menjadi Joko Sinting (Wawancara dengan Rahmadi, 25 September 2017). Idiom baru ini dianggap lebih terlihat menakutkan dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari “organisasi” ini. “Joko” merupakan istilah untuk anak laki-laki yang masih membujang atau belum punya istri. Hal ini sesuai dengan anggota Joxzin yang kesemuanya laki-laki. Tanpa ada aturan tertulis, anggota Joxzin juga dilarang berpacaran. Apabila ada anggota Joxzin yang ketahuan membonceng wanita, akan diteriaki “ciak...ciak...ciak” agar yang bersangkutan malu dan merupakan kode untuk tidak berpacaran (Wawancara dengan Asmuniryas, 30 September 2017). Bahkan bila ketahuan apel di rumah pacarnya, beberapa anggota Joxzin lainnya akan datang ke rumah tersebut untuk mengganggu dan membuat kapok anggota Joxzin yang pacaran tersebut (Wawancara dengan Rizky Kurniawan, 19 September 2017).

Hubungan antara anggota terjalin atas ikatan yang terbentuk dalam solidaritas bersama dalam organisasi itu. Semua anggota punya posisi dan kedudukan yang sama. Bahkan tidak ada ketua dalam *gank* Joxzin, yang ada adalah sesepuh atau orang yang dituakan atau paling dihormati (Wawancara dengan Rahmadi, 25 September 2017). Tidak ada tradisi perplonconan bagi anggota junior atau anggota yang baru masuk. Hanya saja,

anggota yang junior harus menghormati anggota yang senior, sedangkan anggota yang senior harus melindungi dan membantu anggota yang junior. Anggota Junior yang *kemlinthi* dan tidak menghormati senior akan dihajar oleh teman-temannya sendiri. Untuk menambah keyakinan dan keberanian dalam berkelahi, anggota-anggota Joxzin meminta do’a dan jimat kepada seorang spiritualis agama dari pondok Krapyak yaitu Gus Kendar yang akrab disebut dengan Lek Ken (Wawancara dengan Hidayat Saefullah, 17 September 2017). Bila akan melakukan perkelahian atau menyerang kelompok lain, anggota-anggota Joxzin terlebih dulu datang rumah Gus Kendar di Pondok Krapyak untuk meminta jimat atau diisi tubuhnya dengan kekebalan. Mereka melakukan wiridan dan ngaji terlebih dahulu baru dilakukan pengisian kekebalan dengan memakan gotri bersama pisang yang sudah diberi doa (Wawancara dengan Rahmadi, 25 September 2017).

Dalam berekspresi dan menunjukkan identitas serta keberadaannya, anggota Joxzin sering melakukan vandalisme atau mencorat coret tembok dengan identitas *gank*. Corat coret dilakukan dengan pilox warna hijau di tembok-tembok rumah atau toko dengan nama *gank*, yaitu “joxzin” atau “jxz” (Wawancara dengan Muhammad Edi Fauzan, 13 September 2017). Penulisan “jxz” dibanyak tempat dapat memunculkan istilah baru bagi joxzin, yaitu “cah 14”. Istilah itu berasal dari penulisan “jxz” yang bila dilihat bentuk tulisannya j bisa mirip dengan angka 7, x berarti perkalian, dan z mirip dengan angka 2. Bila digabungkan 7×2 (tujuh kali dua) yang berarti 14 (empat belas). Identitas lainnya yang menonjol untuk mengenali anggota Joxzin adalah *pelek* ban atau knalpot yang di

cat warna hijau pupus. Slogan atau yel-yel untuk menyemangati bila melakukan konvoi atau corat coret di tembok adalah “Joxzin Never Die”, Jogjakarta Islamic Never Die, atau “Sekali Kayuh 10 kepala Qzruh” (Wawancara dengan Rahmadi dan Aji, 25 September 2017).

Wilayah “kekuasaan” Joxzin meliputi seluruh Yogya bagian selatan, sedangkan Qzruh menguasai Yogya bagian utara dengan batasnya adalah tugu yogya. Oleh karena itu, konvoi yang dilakukan sebagian besar melewati wilayah selatan, walaupun kadang-kadang masuk juga ke wilayah utara. Konvoi motor pada akhirnya menjadi ritual wajib yang dilakukan sebelum kegiatan nongkrong bubar (Wawancara dengan Asmuniryas, 30 September 2017). Konvoi bisa melibatkan puluhan hingga ratusan motor dari berbagai jenis motor mulai dari RX King hingga Astrea 800 yang hampir semuanya dipreteli dan knalpotnya blombongan. Sebagian besar rombongan konvoi dari anak-anak Joxzin mabuk karena menenggak minuman keras. Rute yang dilewati tidak menentu, tetapi bila bertemu dengan rombongan lawan terutama Qzruh pasti terjadi bentrokan dan bacok-bacokan, karena masing-masing pihak membawa senjata tajam (Wawancara dengan Rizky Kurniawan, 19 September 2017). Wilayah yang sering menjadi ajang perkelahian adalah perempatan Malioboro depan bank BNI, alun-alun, jalan Mataram, dan jalan Solo (Wawancara dengan Hidayat Saefullah, 17 September 2017). Menurut beberapa pengakuan, belum ada yang meninggal karena perkelahian, tetapi banyak yang luka bacok yang harus dilarikan ke rumah sakit. Sebagaimana yang dialami Rahmadi yang mengalami luka bacok di Gedung film Widya Teater oleh anggota lawan bernama Pajeng. Seminggu kemudian anggota Joxzin lainnya

bernama Hendro dari Godean membalaskan pembacokan itu dengan menusuk Pajeng di sekitar selokan Mataram (Wawancara dengan Rahmadi, 25 September 2017). Bentrokan juga dapat mengakibatkan dipenjara, seperti yang dialami Joko Kadir yang masuk bui hampir bersamaan dengan *Gun Jack* (Wawancara dengan Joko “Kadir” Purnomo, 18 September 2017).

Bentrokan besar yang terjadi antara Joxzin dan Qzruh terjadi pada akhir tahun 1987 di batas kota jalan Solo yang merupakan markas Qzruh. Bentrokan melibatkan ratusan anggota Qzruh dan Joxzin. Dalam bentrokan itu, terdapat beberapa motor yang terbakar, beberapa toko dan bangunan rusak, dan seorang wanita anggota Gank TRB yang berafiliasi dengan Qzruh bernama Neni terkena bacok. Permasalahan menjadi berkepanjangan ketika orang tua Neni merupakan seorang jenderal di Angkatan Darat. Akibat dari bentrokan itu, pada tahun 1988 semua gank dipanggil ke KODIM dan menyatakan ikrar untuk membubarkan diri (Wawancara dengan Darto, 18 September 2017). Untuk sementara Joxzin vakum, terlebih lagi banyak anggota yang bersembunyi karena dicari aparat. Akan tetapi, pada akhir tahun 1988, Joxzin aktif kembali dan benar-benar vakum pada tahun 1995an. Setelah reformasi, Joxzin muncul lagi, tetapi lebih kepada kepentingan politik daripada organisasi anak muda yang liar (Wawancara dengan Asmuniryas, 30 September 2017).

Akibat dari reputasi sebagai anak pemberani dan suka berkelahi, banyak anggota-anggota Joxzin yang dipercaya sebagai keamanan kompleks pertokoan, gedung film, maupun hiburan malam. Kadang-kadang mereka disewa untuk

keamanan event-event tertentu, seperti pentas musik, turnamen sepakbola, atau hajatan besar. Akibat reputasi ini pula yang kebetulan juga secara geografis maupun ideologis mereka dekat dengan aktivitas PPP, maka orientasi politik Joxzin diarahkan ke Partai berlambang Ka'bah ini. Anggota Joxzin merupakan simpatisan yang militan yang tergabung dalam laskar-laskar di PPP (Wawancara dengan Asmuniryas, Joko dan Rizky, 30 September 2017).

Qzruh

Terdapat beberapa versi tentang terbentuknya gank Qizruh di Yogyakarta. Pada sebuah tulisan di internet yang tidak diketahui darimana sumbernya menyebutkan bahwa Qizruh sudah berdiri sejak tahun 1961 untuk melawan ketidakadilan yang terjadi waktu itu (stezine-a.blogspot.co.id, 2011). Berdasarkan sumber lisan, Qizruh baru eksis pada tahun 1980an yang keberadaannya didahului adanya *Gank SEC (Siliwangi Empire Complex)* yang berdiri tahun 1974 di Semarang. SEC didirikan oleh anak-anak kolong atau anak-anak tentara yang memilih markasnya di jalan Siliwangi Semarang. Lambat laun SEC semakin besar dan keberadaannya tidak hanya di Semarang tapi merambah ke kota-kota lainnya termasuk Yogyakarta (Wawancara dengan Rahmadi, 25 September 2017). Tidak diketahui apakah disponsori SEC atau beberapa anggota SEC mendirikan Qizruh, pada tahun 1985 Qizruh sudah menunjukkan eksistensinya yang dikomandani kakak beradik anak seorang tentara, yaitu Uun dan Joko Pelek yang kemudian didukung pula oleh Darto (Wawancara dengan Asmuniryas, 30 September 2017).

Qizruh merupakan kependekan dari Qami Zuka Ribut Untuk Hiburan. Markas utama Qizruh di Gedung Bioskop Presiden Theater (sekarang Galeria Mall) depan rumah sakit Bethesda, terban, dan gapura batas kota di jalan Solo. Darto menguasai markas di Bioskop Presiden theater, sedangkan Uun dan Joko Pelek menguasai Terban dan Gapura batas kota di jalan Solo (Wawancara dengan Kuswardiyanto Narendrotomo, 27 September 2017). Tempat tongkrongan lain yang dianggap favorit adalah diskotik Crazy Horse (sekarang menjadi Jogja Jogja) di Jalan Magelang. Wilayah kekuasaan Qizruh berada di Yogyakarta bagian utara dengan titik batas di Tugu Yogya.

Pada awal perkembangannya, anak-anak muda yang masuk ke *gank Qizruh* karena mengetahui informasi dari teman sekolah atau teman kampung yang terlebih dulu masuk ke organisasi ini. Tidak ada seleksi dan syarat-syarat tertentu bila ingin menjadi anggota Qizruh. Syaratnya hanya loyal, menjaga toleransi, dan keakraban di antara anggota-anggota Qizruh lainnya. Seiring dengan kiprah Qizruh yang mulai menunjukkan reputasi sebagai Gank pemberani dan suka berkelahi, keanggotaan Qizruh semakin banyak yang mencapai hampir seluruh wilayah Yogyakarta bagian utara. Sebagaimana Joxzin, Qizruh juga merambah hingga ke luar kota Yogyakarta, seperti Purworejo, Temanggung, Klaten, Solo, dan kota lainnya di sekitar Yogyakarta. Kebanyakan anak-anak Qizruh berasal dari sekolah BOPKRI I, BOPKRI II, SMA 6, SMA 9, dan SMA-SMA yang terletak di Yogyakarta bagian utara (Wawancara dengan Darto, 18 September 2017).

Untuk menunjukkan identitas dan sebagai ciri pembeda dari gank-gank lain, pelek atau bagian dari sepeda motor anggota Qizruh diberi warna putih. Seiring dengan kegemaran anggota Qizruh terhadap aliran musik Death Metal (seperti Q-Zruh Molo Death, Q-Zruh Ghost Gate, dan lain-lain). Beberapa anggota Qizruh menggunakan warna hitam di bagian motor mereka sebagai simbol pembeda. Selain nongkrong dan berkonvoi, aktivitas yang menonjol dari anak-anak Qizruh adalah vandalisme dengan mencorat-coret tembok dengan identitas organisasi. Tembok-tembok pertokoan, kantor, rumah pribadi menjadi sasaran corat coret dengan menyemprotkan pylox yang bertuliskan “Qizruh”, “Qzr” atau “The Qezer”. Yel-yel atau slogan pada saat berkonvoi atau saat vandalisme adalah “1 liter bensin 10 kepala Joxzin” atau “Sekali tebas mati cah 14” (<http://stezine-a.blogspot.co.id/2011/10/sejarah-geng-legendaris-yogyakarta.html>).

Sebagaimana Joxzin, Qizruh juga menggunakan konvoi sepeda motor sebagai ritual yang harus dilakukan bila sudah merasa cukup untuk nongkrong. Wilayah yang sering dilewati konvoi adalah wilayah Qizruh yaitu Jalan Kaliurang, Jalan Solo, Jalan Magelang, seputaran tugu, dan kadang-kadang juga melewati malioboro, alun-alun yang sebenarnya merupakan markas Gank Joxzin. Untuk menambah keberanian beberapa anggota Qizruh menenggak minuman keras hingga mabuk dan membawa senjata tajam mulai dari pedang, samurai, kapak, dan senjata tajam lainnya. Begitu sangarnya konvoi dari Qizruh hingga muncul istilah “bila motor putih konvoi, minggir saja daripada kena sangkur” (Wawancara dengan Darto, 18 September 2017). Konvoi dilakukan tiap

malam minggu atau malam tanggal merah perayaan hari-hari besar. Pada saat konvoi, bila ketemu gank musuh terutama Joxzin, pasti terjadi bentrokan dan perkelahian.

Sejak bentrokan besar di batas kota Jalan Solo tahun 1987, aktivitas Qizruh sedikit menurun dan akhirnya dibubarkan di Kodim Pada tahun 1988. Sebagian anggota Qizruh dibawa Darto menjadi anggota Pemuda Pancasila. Sebagian anggota lainnya bersimpati dan masuk ke dalam laskar-laskar PDI. Walaupun sudah dibubarkan di KODIM, sampai akhir tahun 1990an aktivitas Qizruh masih terasa. Oleh karena mempunyai reputasi sebagai anak-anak pemberani dan suka berkelahi, banyak anggota Qizruh yang disewa untuk mengamankan gedung perkantoran, pertokoan, gudang, maupun tempat hiburan. Kadang-kadang anggota Qizruh dilibatkan untuk pengamanan event-event besar di Yogyakarta, seperti pentas musik, turnamen sepak bola, maupun perhelatan-perhelatan besar lainnya.

SIMPULAN

Non-state aktor merupakan aktor yang berperan penting dalam mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat yang berada di luar struktur pemerintahan. Pada masa Orde Baru, salah satu aktor yang berperan penting dalam memengaruhi kondisi masyarakat adalah keberadaan para preman dan aksi-aksi premanismenya. Preman merupakan kekuatan di masyarakat yang memiliki keberanian, suka berkelahi, dan tidak gampang menyerah. Kelebihan inilah yang dimanfaatkan oleh partai-partai politik pada masa Orde Baru di Yogyakarta dalam upayanya menekan dan mengintimidasi

lawan politik serta sebagai sarana untuk mendapatkan suara dalam pemilu. Dalam setiap kampanye, bentrokan di antara kekuasaan-kekuatan politik di Yogyakarta tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, kehadiran preman yang mendukung kekuatan politik itu berperan penting dalam mengamankan dan menjaga kelancaran kampanye yang sedang dilakukan. Sementara itu, para preman bersedia bergabung dengan Partai politik karena ingin mendapat perlindungan secara politik dan merupakan sarana meniti karir yang lebih baik di masa depan.

Pada masa Orde Baru, Golkar merupakan kekuatan politik yang sedang berkuasa. Untuk menjaga eksistensinya dan masih tetap sebagai kekuatan politik yang berkuasa, Golkar memanfaatkan organisasi massa yang bersedia melakukan aksi-aksi kekerasan, yaitu Pemuda Pancasila. Organisasi massa ini merekrut anggotanya dari berbagai macam kalangan termasuk di dalamnya para preman. Para preman ini merupakan kekuatan utama di dalam PP karena kelebihan mereka dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah dengan cara apapun termasuk cara-cara kekerasan. Golkar juga memanfaatkan PP untuk menekan partai-partai lain agar tidak dapat menonjol dan mendapatkan suara yang banyak dalam pemilu.

Menghadapi tekanan dari Golkar, PPP dan PDI di Yogyakarta juga memanfaatkan dan menerima preman dalam struktur kelaskaran di partai. Baik PPP maupun PDI mengandalkan laskar-laskar dalam partai yang begitu banyak sebagai kekuatan yang diharapkan mampu menjaga keamanan dan menyelesaikan masalah-masalah partai dengan cara kekerasan. Tidak seperti keberadaan GPK di PPP maupun Tentara Langit di PDI pada

masa reformasi, laskar-laskar di PPP dan PDI pada masa Orde Baru terlalu banyak sehingga sulit menentukan laskar mana yang paling militan. Massa militan justru didapat dari organisasi-organisasi liar anak-anak muda yang tergabung dalam *Joxzin* dan *Qizruh*.

Joxzin dan *Qizruh* hadir pada saat “dunia” hitam atau dunia kriminalitas di Yogyakarta sedang tidak ada tokoh yang disegani maupun ditakuti. Hal ini disebabkan, pada tahun 1983 sampai 1984, terjadi OPK (Operasi pemberantasan Kejahatan) terhadap gali-gali berpengaruh dan ditakuti yang dikenal dengan nama petrus (penembakan misterius). Pada saat “kekuasaan” dunia hitam kosong, *Joxzin* dan *Qizruh* hadir sebagai alternatif dari anak-anak muda untuk mengekspresikan diri dan wadah dalam mencari identitas. Dengan cepat *Joxzin* dan *Qizruh* mendapatkan banyak anggota dan terkenal dengan reputasinya yang suka berkelahi, pemberani, tukang bacok, sadis, dan brutal. Setelah perkelahian yang brutal di Jalan Solo pada tahun 1987, *Joxzin* dan *Qizruh* dibekukan oleh pemerintah bersama gank-gank lainnya. Walaupun masih aktif hingga tahun 1995, *Joxzin* dan *Qizruh* tidak sebrutal dan semilitan lagi. Hal ini disebabkan, sejak tahun 1988 pentolan-pentolan *Qizruh* bergabung ke PP yang berarti mendukung Golkar, dan beberapa pentolan lainnya memilih mendukung PDI. Sementara itu, Sesepuh-sesepuh *Joxzin* banyak berkarir menjadi kekuatan utama dari laskar-laskar yang ada di PPP.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Arif, 2003. “Pemuda Pancasila dan Rezim Represif Orde Baru”, *Skripsi S1*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,

- Ali Murtopo, 1981. *Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: CSIS.
- Geertz, Clifford, 1999. *After the Fact: Dua Negeri Empat Dasawarsa, Satu Antropolog* Yogyakarta: LKiS.
- Hobsbawm, 1959. *Primitive Rebels*, Menchester: University of Menchester.
- Hobsbawm, 1972. *Bandits*, Penguin Book. <http://pemudapancasila04.blogspot.co.id/2009/01/selayang-pandang-pemuda-pancasila.html>
- <http://stezine-a.blogspot.co.id/2011/10/sejarah-geng-legendaris-yogyakarta.html>
- Idi Subandi Ibrahim dan Dedi Djamaludin Malik (ed.), 1997. *Hegemoni Budaya*, Yogyakarta: Penerbit Bentang.
- Iswandi, 1998. *Bisnis Militer Orde Baru: Keterkaitan ABRI dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Rezim Otoriter*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jogi Sianjuntak, (ed.), 2000. *Premanisme Politik*, Yogyakarta: Institut Studi ARUS Informasi.
- Julianto Ibrahim, 2004. *Bandit dan Pejuang di Simpang Beengawan: Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*, Surakarta: Cipta Bina Pustaka.
- Julianto Ibrahim, 2002. "ABRI dan Kapitalisme Ersatz di Indonesia", *Humaniora* Volume XIV no.3.
- Mochtar Pobotinggi, 1986. "Tentang Visi, Tradisi & Hegemoni Bukan Islam: Sebuah Analisis" dalam Mochtar Pobotinggi, (ed.), *Islam: Antara Visi, Tradisi dan Hegemoni Bukan Muslim*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Monika Dian Adelina, 2017. "Dilematis Pemberantasan Premanisme di Indonesia" <http://interseksi.org/archive/blog/files/premanisme.php>, diunduh 1 Maret .
- Muhamad Sobari, 1996. "Kebudayaan Rakyat: Dagelan dan Pasemon Punokawan?" dalam Mohamad Sobary, *Kebudayaan Rakyat: Dimensi Politik dan Agama*, Yogyakarta: Yayasan Bentang.
- Neyla Vellayati, 2017. "Psikologi Komunikasi: Premanisme Dalam Perspektif Theory Planned Behavior" dalam <http://empowermentcomm.blogspot.co.id/2015/05/psikologi-komunikasi-premanisme-dalam.html> diunduh 1 Maret.
- Nordholt, Henk Schulte, 2002. *Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- "Pengertian Golongan Karya Dan Perannya Pada Masa Orde Baru" dalam <http://sejarahindonesiadahulu.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-golongan-karya-dan-perannya.html>
- "Pemuda Pancasila Menebar Premanisme Sejak Orde Baru", 5 Juli 2015 dalam <https://solidaritas.net/pemuda-pancasila-menebar-premanisme-sejak-masa-orde-baru/>
- Perekonomian Indonesia Masa Orde Baru", dalam <https://ekaodon.wordpress.com/2011/02/27/perekonomian-indonesia-masa-orde-baru/>
- "Prestasi Pembangunan Bidang Ekonomi" dalam <http://soeharto.co/prestasi-pembangunan-bidang-ekonomiprestasi-pembangunan-bidang-ekonomi>
- Ryter, Lren, 1998. "Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Freeman of Soeharto's New Order?", *Indonesia* 66.
- Sartono Kartodirdjo, 1992. *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia.
- Sartono Kartodirdjo, 1981. "Revolusi Indonesia dipandang dari Perspektivme Struktural", *Prisma*, no.8 Agustus.
- Siegel, James T., 2000. *Penjahat Gaya (Orde) Baru: Elorasi Politik dan Kriminalitas* Yogyakarta: LKiS,
- Suhartono, 1993. *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa: Studi Historis 1850-1942*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Szimansky, Albert, 1978. *The Capitalist State and the Politics of Class*, Massachusetts: Wintrop Publisher.

Sumber Lisan

No	Nama	Umur	Status MasaOrde Baru	Alamat
1	Heru Wintaka	50an	Ketua PP Kota Yogya	Markas PP Yogya
2	Eko Erdianto	48	Komandan Kopimatidana PP	Tamanan Bantul
3	Diah Safitri	-	Istri Gun Jack	Gg Melati Badran
4	Muh. Edi Fauzan	49	Anggota Joxzin	Kotagede Yogya
5	Rizky Kurniawan	49	Sesepuh Joxzin	Jl. Panjaitan Yogya
6	Syarif Hidayat	-	Ketua Satgas PPP	Janturan Yogya
7	Hery Priyono	65	Simpatisan PDI	Lempuyangan
8	Nuryaman	51	Anggota Joxzin	Lempuyangan
9	Drs. Agus Mulyono, MM	55	DPRD dr Golkar	Janabadra Yogya
10	H Sapuani	-	Komandan SatgasPPP Laskar Hamka	Jetis Bantul
11	Yohanes Seran Keban	60an	Wakil Ketua pemenangan Golkar	Sekretariat Golkar Yogya
12	Supardi Andoko	54	Pengurus FKPPi	Kotabaru Yogya
13	Heri Wibisono	53	Komandan Inti PP	Kotabaru Yogya
14	Suseno	30	Simpatisan PPP	Jl Parangtritis Yk
15	Toni Alias Penjol	31	Anggota Joxzin (baru)	Beji Kulon Progo
16	Hidayat Syaefullah	50an	Satgas PPP, Anggota Joxzin	Jl Sutomo Bantul
17	Harun AL Rasyid	67	Komandan satgas Golkar	Sendang Sombo
18	Darto "Qizruh"	50an	Ketua Qizruh Anggota PP	Seyegan Sleman
19	Joko "Kadir" Purnomo	43	Anggota Joxzin, Satgas PPP	Jogokaryan, Yogya
20	Siwi	-	Ketua Gank TBC	Bambanglipuro
21	Bambang Aris	55an	Komandan satgas PPP	Jl TRM Yogya
22	Abu Santoso	-	Anggota PPP, Hampir menjadi korban Petrus	Yogyakarta
23	Suroso	51	Teman Gun Jack	Triharjo Sleman
24	HM Syukri Fadholi, SH	66	Ketua DPW PPP	Suronatan Yogya
25	Hari Prastowo Adityo Putro	-	Ketua Umum Laskar Tentara Langit (PDI)	Yogyakarta
26	Doni Rulianto Setiawan	-	Anak Angkat Gun Jack	Tirtonirmolo, Bantul
27	Suprpto	75	Anggota Brimob, pelaksana OPK (Petrus)	BausasaranYogya
28	Sutrisno	55	Kakak Kandung Gun Jack	Badran Yogya
29	Ervian Parmunadi	49	Sesepuh Joxzin	Kauman Yogya
30	Danarto "Danang"	-	Simpatisan PDI	Umbulharjo, Yogya
31	Tugiat	68	Saksi mata OPK	Dlinggo Bantul
32	Khalil Purnomo	-	Simpatisan PPP	Sate Depan, P.Rapih
33	Suharto	60an	Ketua PP tahun 1980an	Gampingan Baru
34	Rahmadi	50	Pendiri Joxzin	Sedayu
35	Ngadimin Atmo Harjito	67	Abdi Dalem Kraton	Suryoputran, Yogya
36	Suharso Budjihardjo	65	Ketua PDI wil Gowongan	Jogoyudan
37	Muh. Alfian Darmawan	65	Anggota DPR dr PPP	Warungboto
38	Setiyaman	84	Ketua PDI th 1990an	Kujon, Kulon Progo
39	Kuswardiyanto Narendrotomo	47	Anggota Joxzin	Ps Klitikan
40	Yosi	-	Anggta GPK	Muja Muju
41	Drs. Faried JayenSupardjan SH	52	Satgas PP, Ketua Umum PP(Skrng)	Purwomartani

No	Nama	Umur	Status MasaOrde Baru	Alamat
42	Santi Ariningsih	-	Anggota Laskar Intifada	Karangkajen
43	Bambang Suhasno	-	Anggota Laskar Intifada	Karangkajen
44	Isbad Guntoro	48	Satgas PPP	Kotagede
45	Ahmad Badrowi	66	Simpatisan PDI	Terban
46	Asmuniryas	54	Sesepuh Joxzin	Kauman
47	Joko	48	Anggota Joxzin	Bantul
48	Edi Riyanto	60an	Simpatisan PDI	Terban
49	Budi Maryono	-	Korlap Tentara Langit	Malioboro
50	Aji "Gajah"	43	Sesepuh Joxzin sektor Timur	Tamanmartani
51	Maman Sulaiman	69	Satgas AMD PPP	Suryodiningratan